

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan indikator sosial-ekonomi dan pendidikan menggunakan metode Hierarchical Clustering. Hasil klasterisasi menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antara wilayah yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Penggunaan metode ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang distribusi sosial-ekonomi dan pendidikan di Jawa Timur, yang penting untuk perencanaan pembangunan yang berbasis bukti.

Selain itu, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan berbagai soft skill, seperti kerja sama tim, kedisiplinan, dan kemampuan analitis dalam pengolahan data. Pengalaman ini sangat berharga dalam mempersiapkan penulis untuk tantangan di dunia kerja. Meskipun hasil klasterisasi memberikan gambaran yang bermanfaat, kualitas pengelompokan dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan pemilihan variabel dan mencoba metode klasterisasi yang lain untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan relevan.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas analisis dan implementasi kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Pertama, kepada pemerintah daerah, disarankan untuk memperkaya data yang digunakan dalam analisis klasterisasi dengan indikator tambahan yang lebih spesifik, seperti akses terhadap layanan kesehatan, infrastruktur pendidikan, dan tingkat partisipasi kerja. Penambahan indikator ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial-ekonomi dan pendidikan di setiap wilayah, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat

lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan daerah. Kedua, bagi peneliti dan praktisi data, disarankan untuk mempertimbangkan variasi metode klasterisasi, seperti K-Means atau Gaussian Mixture Models (GMM), guna membandingkan hasil yang diperoleh dan memastikan bahwa klasterisasi yang dilakukan lebih robust dan valid. Penggunaan berbagai metode akan membantu memperoleh hasil yang lebih mendalam dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelompokan wilayah. Terakhir, untuk pengambil kebijakan, penting untuk melibatkan ahli kebijakan publik dalam proses validasi hasil klasterisasi guna memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan pembangunan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan analisis klasterisasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis bukti, terarah, dan berkelanjutan.